

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA_{t-1}), Penanaman Modal Dalam Negeri ($PMDN_{t-1}$), penyerapan tenaga kerja, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri di Provinsi Jawa Barat tahun 2002-2016 dengan menggunakan regresi linear berganda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara bersama-sama variabel PMA_{t-1} , $PMDN_{t-1}$, penyerapan tenaga kerja, dan UMP berpengaruh terhadap PDRB sektor industri di Provinsi Jawa Barat tahun 2002-2016. Pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut :
 - a. PMA_{t-1} dan UMP berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor industri di Provinsi Jawa Barat tahun 2002-2016.
 - b. $PMDN_{t-1}$ dan penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor industri di Provinsi Jawa Barat tahun 2002 - 2016.
2. Variabel yang paling berpengaruh terhadap PDRB sektor industri di Provinsi Jawa Barat tahun 2002-2016 adalah PMA_{t-1} .

3. Tren perkembangan PDRB sektor industri di Provinsi Jawa Barat tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 menunjukkan tren yang positif.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka dapat diberikan implikasi sebagai berikut :

1. Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus meningkatkan PMA dengan memberikan penyederhanaan dalam perizinan kepada investor, penyederhanaan birokrasi dan tetap menjaga agar terjadi kesinambungan antara investasi asing dengan domestik. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan penyediaan pelayanan satu loket dengan layanan perizinan investasi yang lebih mudah. Calon investor hanya mengurus izin melalui satu loket kemudian sistem akan berjalan secara otomatis. Pemerintah daerah melakukan kebijakan yang menciptakan iklim investasi yang cepat dan secara online. Pemohon cukup mengunduh berkas-berkas persyaratan dari rumah maupun kantor mereka tanpa harus ke kantor perizinan untuk percepatan proses perizinan dan penyederhanaan prosedur. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kegiatan investasi agar tetap lancar. Pemberian keringanan pajak penghasilan, atau bea masuk bahan baku merupakan salah satu yang diharapkan oleh investor, sehingga pemerintah juga dapat membuat kebijakan pengurangan pajak kepada investor. Selain itu,

perbaikan fasilitas juga harus dilakukan seperti meningkatkan infrastruktur jalan, air, listrik yang dapat menunjang kelancaran investasi. Kemudahan lain yang dapat diberikan kepada investor asing adalah seperti ketersediaan data informasi peluang penanaman modal dan fasilitas pelayanan keimigrasian. Di samping itu pemerintah harus membuat kebijakan yang tidak merugikan penanam modal dalam negeri, seperti kebijakan yang mengatur pembatasan jumlah penanaman modal asing di bidang perkebunan dengan nilai tertentu misalnya maksimal 30 persen karena perkebunan merupakan usaha yang padat modal pada sektor industri pengolahan. Selain itu, peraturan mengenai penggunaan tenaga kerja dalam negeri lebih diperhatikan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perlunya kebijakan mengenai efisiensi pengelolaan sumber daya alam mengingat penanaman modal merupakan upaya pembangunan berkelanjutan.

2. Terkait Upah Minimum Provinsi (UMP), pemerintah harus membuat kebijakan yang lebih baik lagi sehingga upah minimum yang ditetapkan dapat sesuai dan tidak merugikan bagi pihak pengusaha maupun para pekerja. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melimpahkan kewenangan penetapan upah minimum provinsi kepada gubernur karena yang paling memahami kondisi di daerahnya. Sehingga diharapkan besar upah minimum tersebut dapat sesuai dengan kondisi riil yang ada. Upah berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang penting dan berpengaruh terhadap

hasil produksi suatu perusahaan. Apabila semakin tinggi produktivitas tenaga kerja tersebut, maka dapat menghasilkan produk yang banyak juga. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi secara intens mengenai pemberian tunjangan dalam upah minimum agar tidak merugikan pihak pengusaha maupun para pekerja.

3. Tren Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 hingga 2020 menghasilkan tren yang positif, maka pemerintah perlu meningkatkan dan mempertahankan melalui kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan PMA khususnya pada sektor industri serta UMP. Mengingat bahwa PMA dan UMP merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor industri di Provinsi Jawa Barat. Pembaharuan mengenai peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu perlu dilakukan guna meningkatkan kemudahan investor untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, perlunya pembaharuan mengenai peraturan upah minimum agar selalu sesuai dengan kondisi di Provinsi Jawa Barat.